



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah dokumenter di Indonesia berawal dari era kolonial Belanda tahun 1900, di mana pada masa itu produksi film dokumenter ditujukan untuk media propaganda, yang makin terang-terangan dipergunakan saat penjajahan Jepang setelahnya. Pasca kemerdekaan pun, film dokumenter juga bersifat propaganda, dengan tujuan membangun nasionalisme di Indonesia (Eagle Institute, 2016). Shoelhi (2012, h. 118-119) menyebutkan bahwa kegiatan propaganda kerap melibatkan media massa karena kelebihannya untuk mempengaruhi dan jangkauan siaran yang luas.

Dalam sejarah Indonesia, kejelasan kejadian Gerakan 30 September 1965 diwarnai dengan propaganda lewat media massa, dalam hal ini film dokumenter berjenis *docudrama*, yakni kisah drama yang mendasarkan struktur plot dan penggambaran karakter dari kejadian nyata (Nichols, 2010, h. 145). *Pengkhianatan G 30 S PKI* menjadi film *docudrama* paling berpengaruh di era Orde Baru karena merupakan 'narasi utama' dalam sejarah resmi Indonesia sejak 1966, terutama mengenai peristiwa G30S (Heryanto, 2006, h. 8). Sen dan Hill (2007, h. 148) menyebutkan bahwa *Pengkhianatan* tidak dirilis secara komersial, melainkan menjadi tontonan wajib di sekolah dan departemen pemerintah, dan dari pertengahan 1980-an hingga 1997 ditayangkan di stasiun TVRI dan stasiun swasta pada tanggal 30 September tiap tahunnya, dan berdasarkan rating pada 30

September 1997, *Pengkhianatan* adalah film Indonesia yang paling banyak ditonton hingga saat ini.

Pasca Orde Baru, narasi dalam kejadian G30S yang didominasi film *Pengkhianatan* mulai mendapat tandingan melalui film dokumenter lain. Heryanto (2012, h. 16) menyebutkan bahwa terdapat 16 film dokumenter yang berfokus pada peristiwa pembunuhan massal 1965 telah diproduksi. Sebagian besarnya dipublikasikan dalam skala kecil, dan dibuat oleh para penyintas, organisasi non-pemerintah dan pembuat film lokal. Putu Oka Sukanta disebut sebagai produser yang paling banyak memproduksi film dokumenter yang mengangkat peristiwa berdarah tahun 1965: *Menyemai Terang dalam Kelam* (2006), *Perempuan yang Tertuduh* (2007), *Seni Ditating Jaman* (2008), *Tjidurian 19* (2009), *Plantungan: Potret Derita dan Kekuatan Perempuan* (2011). Judul lainnya adalah *Bungatembok* (2003), *Kawan Tiba Senja: Bali seputar 1965* (2004), *Putih Abu-Abu: Masa Lalu Perempuan* (2006), *Sinengker: Sesuatu yang Dirahasiakan* (2007), *Puisi Tak Terkuburkan* (1999), *Djejak Darah: Surat Teruntuk Adinda* (2004), *Mass Grave* (2002). Dokumenter yang dibuat oleh pembuat film luar negeri adalah *Shadow Play* (2001), *Terlena: Breaking of A Nation* (2004), *40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy* (2009).

Salah satu film yang mengangkat peristiwa pembunuhan massal 1965 adalah *The Act of Killing* (2012). Film dokumenter karya sutradara berkewarganegaraan Amerika-Inggris, Joshua Oppenheimer ini mengambil fokus kehidupan orang-orang yang ambil bagian dalam peristiwa pembunuhan massal 1965 di Sumatra Utara, yang berawal dari proyek film dokumenter yang bekerja

sama dengan serikat pekerja perkebunan di Sumatra Utara berjudul *The Globalization Tapes*. Dalam proses pembuatan film tersebut, Joshua Oppenheimer dan kru menemukan bahwa pembunuhan massal yang terjadi pada 1965-1966 adalah rahasia gelap yang menghantui Indonesia saat masuk ke dalam ekonomi global (The Act of Killing, 2012, para. 4). Diskusi mengenai peristiwa pembunuhan massal tersebut kerap terjadi ketika proses syuting, dan para pekerja yang merupakan penyintas dari peristiwa tersebut akan menunjukkan rumah tetangga mereka yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Para pelaku masih tinggal di desa yang sama dengan mereka, dan membuat sebuah struktur kekuasaan lokal dari keturunan mereka. Sebagai orang luar, Joshua Oppenheimer dan kru dapat mewawancarai para pelaku, yang mana hal tersebut tak dapat dilakukan oleh para pekerja tanpa takut akan kekerasan (The Act of Killing, 2012, para. 5).

Sejak pembuatan *The Globalization Tapes*, Joshua Oppenheimer dan Christine Cynn telah melanjutkan proses syuting dengan pelaku dan penyintas dari pembunuhan massal di area perkebunan di kota Medan, dengan mewawancarai dan memfilmkan reka ulang (*reenactments*) dari beberapa pelaku, dan mewawancarai penyintas secara rahasia, hingga akhirnya bertemu dengan Anwar Congo dan Adi Zulkadry, yang merupakan pemimpin dari pasukan pembunuh (*death squad*) lalu menjadi salah satu figur berkuasa di kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia (The Act of Killing, 2012, para. 8-11). Hal tersebut membuat film dokumenter ini menawarkan sudut pandang baru dalam melihat kisah sejarah, terutama bagaimana sebuah film dokumenter merepresentasikan impunitas

terhadap kejahanan kemanusiaan yang lama-kelamaan menjadi budaya impunitas (*culture of impunity*).

Impunitas merupakan ketidakmungkinan secara de jure maupun de facto untuk membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan—baik dalam proses pidana, perdata, administrasi maupun disipliner—karena mereka tidak dikenai penyelidikan apa pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili, dan jika terbukti bersalah, dijatuhi sanksi hukuman yang pantas, dan melakukan perbaikan kepada korban-korban mereka (United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2005, h. 6).

Budaya impunitas ditimbulkan oleh impunitas yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, dan dalam konteks sejarah Indonesia tahun 1965-1966, banyak pelaku-pelaku kejahanan kemanusiaan yang masih menikmati impunitas hingga sekarang. Impunitas terjadi akibat kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban menginvestigasi pelanggaran; mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku, terutama dalam bidang peradilan, dengan memastikan para tersangka pelaku kriminal dituntut, diadili, dan diberi hukuman; untuk menyediakan pemulihan bagi para korban; memastikan hak yang tak dapat dicabut (*inalienable right*) untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran yang terjadi; dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran (United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2005, h. 7).

Peneliti memilih film *The Act of Killing* sebagai subjek penelitian karena film ini diambil dari sudut pandang yang berbeda dari film-film dokumenter

mengenai peristiwa pembunuhan massal 1965 lainnya, di mana dalam film ini, orang-orang yang merupakan pelaku pembunuhan massal menceritakan kisah mereka. Peneliti juga menggunakan semiotika Barthes dalam penelitian ini karena berdasarkan kesimpulan Barthes bahwa makna denotasi adalah makna konotasi yang lain, diyakini bahwa makna denotasi dapat dilihat bukan sebagai makna natural, melainkan sebagai proses naturalisasi makna (Chandler, 2007, h. 138), dan ketika mempelajari makna denotasi, peneliti juga diposisikan dalam ideologi dengan mempelajari konotasi dominan di saat yang sama, sehingga membedakan konotasi dan denotasi berguna secara analitis, namun dalam praktiknya, makna-makna tersebut tak dapat dipisahkan dengan tegas (Silverman, 1983, dikutip dalam Chandler, 2007, h. 139).

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana budaya impunitas (*culture of impunity*) direpresentasikan dalam *The Act of Killing* sebagai film dokumenter yang berbicara tentang situasi dan kejadian yang melibatkan orang-orang sungguhan (aktor sosial) yang memerankan diri mereka sendiri dalam cerita yang menyampaikan usulan atau perspektif dalam kehidupan, situasi, dan kejadian yang digambarkan melalui sudut pandang sang pembuat film (Nichols, 2010, h. 13-14). Kejadian yang digambarkan dalam *The Act of Killing* melalui sudut pandang sutradara Joshua Oppenheimer adalah kehidupan pelaku pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan massal 1965 yang menikmati impunitas, di mana impunitas merupakan suatu kondisi yang menjadi halangan terbesar penegakan hukum terhadap tindak kejahatan, dalam hal ini kejadian terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti pembunuhan dan penyiksaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama penelitian ini adalah: bagaimana representasi budaya impunitas (*culture of impunity*) ditunjukkan dalam film dokumenter *The Act of Killing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana film dokumenter *The Act of Killing* menggambarkan budaya impunitas (*culture of impunity*) melalui elemen-elemen di dalam film tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian terhadap film *The Act of Killing* ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian dalam menganalisis pesan di media massa, terutama film, berikut tanda-tanda yang terdapat di dalamnya.

1.4.2. Manfaat Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi kajian semiotika yang melihat film dokumenter sebagai representasi budaya impunitas (*culture of impunity*).